



Model Pembangunan Infrastruktur Sosial Berbasis Komunitas Melalui Integrasi Nilai-Nilai Filantropi Hindu di Bandar Lampung

Ketut Angga Irawan

Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, Indonesia
ketutanggairawan@gmail.com

Abstract

*Social infrastructure development in Indonesia remains dominated by a top-down approach that limits community participation. This study aims to analyze the integration of Hindu philanthropic values in community-based social infrastructure development in Bandar Lampung. A qualitative descriptive method was employed through in-depth interviews, observation, and document analysis involving Hindu religious leaders, PHDI, PERADAH, KMHDI, and academics. The findings indicate that the values of *dāna*, *seva*, and *karma yoga* are integrated into deliberative decision-making, transparent community fund management, and intergenerational participation, thereby strengthening social cohesion, accountability, and a sense of community ownership over social infrastructure. In addition, the integration of Hindu philanthropic values contributes to the preservation of cultural identity and the sustainability of community social practices. This study concludes that Hindu philanthropy functions as a sustainable social system that supports participatory governance and inclusive community-based infrastructure development.*

Keywords: *Hindu Philanthropy; Social Infrastructure; Community Development; Dāna; Karma Yoga*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia masih didominasi pendekatan top-down yang cenderung membatasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai filantropi Hindu dalam pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas di Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan tokoh agama Hindu, PHDI, PERADAH, KMHDI, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *dāna*, *seva*, dan *karma yoga* terintegrasi dalam praktik musyawarah, pengelolaan dana komunitas yang transparan, serta partisipasi lintas generasi, sehingga memperkuat kohesi sosial, akuntabilitas, dan rasa memiliki warga terhadap infrastruktur sosial. Selain itu, integrasi nilai filantropi Hindu berkontribusi pada pelestarian identitas budaya dan keberlanjutan praktik sosial komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filantropi Hindu berfungsi sebagai sistem sosial berkelanjutan yang mendukung tata kelola partisipatif dan pembangunan infrastruktur berbasis komunitas yang inklusif.

Kata Kunci: *Filantropi Hindu; Infrastruktur Sosial; Pembangunan Komunitas; Dāna; Karma Yoga*

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur sosial merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menunjang aktivitas bersama, seperti pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta ruang publik yang memperkuat ikatan sosial. Di Indonesia, infrastruktur sosial kerap diposisikan sebagai sarana

pemerataan pembangunan dan penguatan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, pembangunan masih didominasi pendekatan top-down dan teknokratis yang kurang memberi ruang bagi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Ketika pembangunan lebih menitikberatkan aspek fisik-material, masyarakat sering kali tidak memiliki rasa keterikatan, sehingga infrastruktur yang dibangun kurang dimanfaatkan secara optimal (Deru et al., 2023).

Masalah utama dalam pembangunan infrastruktur sosial ialah lemahnya partisipasi komunitas dalam keseluruhan proses pembangunan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa proyek infrastruktur menjadi kurang berfungsi karena masyarakat tidak terlibat sejak tahap perencanaan. Padahal, partisipasi komunitas merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Penelitian Syamsiyah, Sadeli, Saidah, Noor, dan Widiyanesti (2025) menegaskan bahwa pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat, serta melibatkan partisipasi sejak tahap awal, memiliki peluang lebih besar untuk berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal, termasuk nilai keagamaan, dalam menjawab keterbatasan pendekatan pembangunan konvensional (Syamsiyah et al., 2025).

Salah satu sumber nilai yang relevan dalam konteks tersebut adalah filantropi keagamaan. Filantropi agama tidak hanya dipahami sebagai tindakan memberi, tetapi juga sebagai manifestasi spiritual yang memperkuat solidaritas sosial. Dalam tradisi Hindu, filantropi diwujudkan melalui nilai *dāna*, *sewa*, dan *dana punia*, yang mendorong pemberian materi, tenaga, pengetahuan, dan waktu demi kepentingan bersama. Penelitian Irawan (2025) menunjukkan bahwa praktik filantropi Hindu telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial, khususnya pembangunan infrastruktur komunal, meskipun dalam banyak kasus masih dikelola secara informal ((Irawan et al., 2025).

Nilai *dāna* dan *sewa* mendorong keterlibatan sukarela masyarakat dalam pembangunan fasilitas komunal tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Tradisi gotong royong yang kuat dalam komunitas Hindu menjadi wujud konkret penerapan nilai-nilai tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan tambahan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil Pembangunan (Wulandari & Trinugraha, 2025). Dengan demikian, filantropi keagamaan memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas.

Urgensi integrasi filantropi keagamaan semakin nyata di tengah tantangan pembangunan modern, seperti globalisasi, urbanisasi, dan pola hidup individualistik yang berpotensi melemahkan semangat kebersamaan. Di sisi lain, kebutuhan terhadap infrastruktur sosial terus meningkat, sementara kapasitas pendanaan pemerintah terbatas. Dalam konteks ini, filantropi berperan tidak hanya sebagai alternatif dan pelengkap sumber pendanaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat tanggung jawab kolektif dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian Rochani, Yuliasuti, dan Sudarwanto (2021) menunjukkan bahwa filantropi yang tumbuh dari semangat kebersamaan berkontribusi pada keberlanjutan infrastruktur komunitas melalui penguatan solidaritas sosial (Rochani et al., 2021).

Dari sisi teoritis, integrasi nilai filantropi Hindu relevan dengan Teori Pembangunan Berbasis Komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, Teori Filantropi Keagamaan yang memandang praktik keagamaan sebagai mekanisme distribusi sosial, serta Teori Pembangunan Berkelanjutan Emil Salim yang menekankan keseimbangan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Nilai *dāna* dan *sewa* berperan sebagai landasan etis yang mendorong keterlibatan sukarela dan keberlanjutan infrastruktur sosial.

Konteks lokal Bandar Lampung menjadi kasus penting dalam penelitian ini karena karakter multikultural kota ini serta keberadaan komunitas Hindu yang aktif dalam pembangunan fasilitas sosial melalui dana punia dan kerja kolektif. Namun, hingga kini, kajian yang secara spesifik menganalisis integrasi nilai-nilai filantropi Hindu sebagai dasar pembentukan model pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas, khususnya di wilayah perkotaan multikultural, masih terbatas. Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai filantropi Hindu dalam pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas di Bandar Lampung serta mengidentifikasi model pembangunan yang terbentuk dalam praktik sosial keagamaan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pembangunan berbasis komunitas dan filantropi keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur sosial yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai budaya serta keagamaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami integrasi nilai-nilai filantropi Hindu dalam pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas di Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung selama kurang lebih enam bulan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 9 informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas tokoh dan anggota komunitas Hindu, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDII), serta akademisi yang memiliki keterlibatan dan kompetensi dalam praktik filantropi dan pembangunan sosial. Pemilihan jumlah informan didasarkan pada prinsip kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru yang signifikan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi keterkaitan nilai filantropi Hindu dengan praktik pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai.

Hasil dan Pembahasan

1. Model Integrasi Nilai Filantropi Hindu dalam Infrastruktur Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai *dāna*, *seva*, dan *karma yoga* membentuk suatu model pembangunan infrastruktur sosial berbasis komunitas yang berlangsung secara siklik melalui tahapan perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Nilai-nilai filantropi Hindu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajaran normatif, tetapi beroperasi sebagai mekanisme sosial yang mengarahkan perilaku kolektif, membangun legitimasi keputusan, serta mengatur relasi sosial dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak dipahami semata sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai proses sosial yang berakar pada kesadaran etis dan religius komunitas.

Pada tahap perencanaan, nilai *seva* berperan sebagai komitmen moral yang mendorong musyawarah berbasis aspirasi warga. Proses perencanaan dilakukan melalui forum komunitas yang memberi ruang partisipasi setara bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Tri

Bayu Tanaya menunjukkan bahwa setiap inisiatif pembangunan selalu diawali dengan musyawarah, karena pembangunan dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan sebagai proyek segelintir aktor. Praktik ini memperkuat legitimasi sosial keputusan pembangunan sekaligus mencegah dominasi aktor eksternal dan potensi resistensi masyarakat terhadap hasil pembangunan (Irawan et al., 2025).

Pada tahap pendanaan, nilai *dāna* diwujudkan melalui praktik *dana* punia, sumbangan material, serta kontribusi tenaga yang dikelola secara transparan. Hasil wawancara dengan Bapak Ketut Artaye mengungkapkan bahwa pencatatan dan pelaporan *dana* dilakukan secara terbuka dalam forum komunitas, sehingga setiap warga mengetahui sumber, jumlah, dan penggunaan *dana*. Transparansi ini membangun hubungan kausal antara praktik *dāna* dan tingkat kepercayaan warga, yang selanjutnya memperkuat keberlanjutan pendanaan serta intensitas partisipasi kolektif. Kondisi ini menegaskan bahwa filantropi tidak beroperasi sebagai tindakan karitatif semata, melainkan sebagai mekanisme tata kelola sosial yang memperkuat legitimasi dan stabilitas institusional. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari dan Sujatmika (2024) yang membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *dana* publik berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan, sekaligus menguatkan pandangan Utama Budi (2013) bahwa nilai *dāna* menempatkan pemberian ikhlas dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial sebagai fondasi legitimasi sosial.

Pada tahap pelaksanaan, nilai *karma yoga* melegitimasi kerja sukarela sebagai bentuk pengabdian spiritual. Partisipasi warga dalam kerja bakti dan gotong royong tidak didorong oleh insentif material, melainkan oleh kesadaran etis untuk menjalankan Dharma dalam kehidupan sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sukarela justru memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas pembangunan melalui pengawasan kolektif. Mekanisme ini memungkinkan warga berperan sebagai pelaksana sekaligus pengawas, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun lebih terjaga dan sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Pada tahap pemeliharaan, integrasi nilai *sewa* dan *dāna* diwujudkan melalui iuran ringan, jadwal kerja bakti berkala, serta kesepakatan bersama mengenai tanggung jawab perawatan fasilitas. Informan penelitian menegaskan bahwa pemeliharaan dipandang sebagai kelanjutan dari pengabdian, bukan sebagai beban tambahan. Skema ini berfungsi sebagai instrumen institusional yang menjaga keberlanjutan infrastruktur sekaligus mencegah konflik internal akibat ketimpangan kontribusi. Dengan demikian, model integrasi nilai filantropi Hindu tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sistem sosial yang adaptif, partisipatif, dan berdaya tahan dalam jangka panjang (Syamsiyah et al., 2025).

2. Peran Lembaga Sosial-Keagamaan Hindu

Lembaga sosial-keagamaan Hindu berperan strategis dalam membentuk keberlanjutan filantropi berbasis nilai spiritual sekaligus memperkuat tata kelola komunitas yang partisipatif. Dalam konteks ini, Parisada Hindu Dharma Indonesia berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif yang menerjemahkan etika Hindu, seperti Tri Kaya Parisudha dan prinsip hukum tabur tuai, ke dalam mekanisme akuntabilitas serta transparansi pengelolaan *dana* umat. Institusionalisasi nilai-nilai tersebut mendorong filantropi bergerak melampaui praktik ritual menuju sistem tata kelola yang menumbuhkan kepercayaan internal dan meminimalkan potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya kolektif. Utami et al. (2018) menegaskan bahwa pelembagaan nilai keagamaan dalam tata kelola komunitas berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial dan penguatan kepercayaan publik. Pandangan ini diperkuat oleh Yasini (2018)

yang menempatkan etika keagamaan sebagai fondasi moral dalam pengelolaan dana umat, serta selaras dengan Latief, H. (2016) yang menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran signifikan dalam mentransformasikan nilai spiritual menjadi praktik tata kelola pembangunan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Nengah Maharta menunjukkan bahwa peran Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan praktik sosial. Pengelolaan dana umat dan aktivitas filantropi diarahkan agar selaras dengan etika Hindu, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban dipahami sebagai bagian dari Dharma, bukan semata kewajiban administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi normatif yang dibangun oleh lembaga keagamaan berfungsi sebagai fondasi moral yang memperkuat kepatuhan kolektif serta mencegah potensi delegitimasi kepemimpinan komunitas.

Peran operasional dan regeneratif dalam ekosistem filantropi Hindu dijalankan oleh Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia mengaktualisasikan filantropi melalui aksi kolektif berbasis partisipasi langsung, sementara Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia berperan sebagai katalis akademik yang memperkuat kapasitas reflektif dan inovatif komunitas melalui riset partisipatif serta transfer pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan generasi muda dan mahasiswa dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan filantropi, karena kelompok ini membawa energi sosial, gagasan baru, dan perspektif kritis yang memperkaya praktik komunitas.

Namun demikian, dinamika tersebut juga menghadirkan tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya, fluktuasi komitmen relawan, kesenjangan antara gagasan akademik dan praktik lokal, serta potensi ketegangan antara idealisme pemuda dan pola otoritas tradisional. Nengah Maharta menegaskan bahwa tanpa mekanisme koordinasi yang inklusif dan komunikasi lintas generasi yang terbuka, perbedaan tersebut berisiko memunculkan fragmentasi partisipasi atau konflik laten dalam praktik filantropi komunitas.

Kolaborasi antara Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia membentuk ekosistem kelembagaan yang saling melengkapi dalam penguatan tata kelola partisipatif. Parisada Hindu Dharma Indonesia menyediakan arah etis dan legitimasi normatif, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia menggerakkan energi sosial pemuda, sedangkan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia memperkaya praktik filantropi dengan perspektif kritis dan berbasis bukti. Pola kolaboratif ini mendorong transformasi filantropi Hindu dari aktivitas ad hoc menuju sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, filantropi berbasis komunitas berfungsi tidak hanya sebagai sarana solidaritas sosial, tetapi juga sebagai arena pembelajaran kelembagaan yang memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur sosial umat Hindu di Indonesia (Irawan et al., 2025).

3. Modal Sosial Gotong Royong sebagai Arsitektur Relasional

Gotong royong yang berakar pada nilai karma yoga membentuk suatu arsitektur relasional yang mengikat komunitas Hindu dalam praktik filantropi berbasis spiritual. Dalam pembangunan pura maupun balai banjar, gotong royong memungkinkan distribusi kerja dan tanggung jawab secara kolektif, di mana partisipasi warga tidak dipahami semata sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai ekspresi Dharma melalui kerja yang dilakukan secara ikhlas. Konsep *ngayah* dalam tradisi Hindu Bali menunjukkan bahwa kerja kolektif tersebut berfungsi sebagai mekanisme penguatan kohesi sosial yang bersumber dari keyakinan religius, sehingga keterlibatan individu didorong oleh ikatan moral dan spiritual, bukan oleh kepentingan instrumental semata (Ganesha, 2024).

Secara praktis, gotong royong berkontribusi terhadap efisiensi biaya, percepatan proses pembangunan, serta peningkatan mutu hasil kerja melalui partisipasi sukarela dalam bentuk tenaga, bahan, dan waktu. Selain itu, keterlibatan kolektif menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang mampu menekan potensi *moral hazard* dan memperkuat kepercayaan antarwarga. Hasil wawancara dengan Suyono menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan fasilitas menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap hasil pembangunan. Rasa memiliki tersebut mendorong komitmen jangka panjang dalam perawatan dan pemanfaatan fasilitas secara berkelanjutan, karena infrastruktur dipandang sebagai hasil kerja bersama, bukan milik kelompok atau individu tertentu. Temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi kolektif berperan penting dalam membangun *sense of belonging* yang menjadi prasyarat keberlanjutan pembangunan berbasis komunitas (Amarta Dwi Wulandari et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas gotong royong sangat bergantung pada tingkat partisipasi yang relatif merata. Ketimpangan kontribusi antarwarga, baik akibat faktor ekonomi, keterbatasan waktu, maupun kapasitas fisik, berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan dan konflik laten yang dapat melemahkan kohesi sosial apabila tidak dikelola secara terbuka dan sensitif. Suyono menegaskan bahwa transparansi pembagian tugas dan fleksibilitas kontribusi menjadi kunci untuk menjaga keadilan partisipatif, sehingga gotong royong tetap dipahami sebagai ruang pengabdian bersama, bukan sebagai beban sosial yang timpang.

Lebih jauh, dalam konteks wilayah multikultural seperti Bandar Lampung, gotong royong berfungsi sebagai *contact zone* lintas agama dan budaya melalui kolaborasi dalam kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, penanganan bencana, serta layanan kesehatan. Interaksi lintas kelompok ini memperluas makna filantropi Hindu dari praktik internal komunitas menuju instrumen integrasi sosial yang lebih luas (Nurhayati et al., 2021). Meski demikian, praktik gotong royong lintas komunitas juga menghadapi tantangan berupa perbedaan nilai, persepsi keadilan, serta potensi politisasi kegiatan sosial. Tanpa mekanisme dialog dan koordinasi yang inklusif, kerja kolektif berisiko dipersepsikan sebagai dominasi kelompok tertentu atau dimanfaatkan untuk kepentingan simbolik semata. Oleh karena itu, gotong royong sebagai modal sosial tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan perlu dikelola secara reflektif agar tetap menjadi fondasi kohesi sosial yang adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam praktik filantropi berbasis komunitas.

4. Peran Pasraman, Sanggar, dan Akademisi dalam Pendidikan dan Pengetahuan

Pasraman dan sanggar seni merupakan infrastruktur sosial nonfisik yang berperan penting dalam transmisi nilai, keterampilan, dan pembentukan identitas generasi muda Hindu. Pasraman berfungsi sebagai ruang internalisasi etika dan spiritualitas berbasis Dharma, sedangkan sanggar seni berperan dalam pelestarian seni tari, tabuh, dan drama klasik sebagai media pendidikan karakter. Keberadaan keduanya berkontribusi pada peningkatan literasi budaya dan keagamaan serta penguatan kohesi sosial generasi muda (Arini, 2024). Hasil wawancara dengan Dewa Putu Anatara menunjukkan bahwa pasraman dan sanggar seni juga menjadi wahana pembentukan tanggung jawab sosial melalui pelibatan aktif generasi muda dalam kegiatan keagamaan dan sosial komunitas. Namun demikian, peran tersebut belum berjalan merata akibat keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses antarwilayah, dan ketergantungan pada relawan, yang berpotensi melemahkan keberlanjutan fungsi pendidikan tanpa dukungan kelembagaan yang memadai.

Akademisi Hindu berperan penting dalam mengkodifikasi praktik filantropi komunitas agar dapat direplikasi secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut mencakup penyusunan modul kerja bakti, perencanaan anggaran partisipatif, serta perumusan indikator keterlibatan warga yang mendukung tata kelola filantropi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis bukti ini terbukti memperkuat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pengelolaan infrastruktur sosial (Amarta Dwi Wulandari et al., 2022). Dewa Putu Anantara menegaskan bahwa pendampingan akademisi membantu komunitas dalam menata administrasi dan pelaporan dana umat, namun pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar mudah dipahami dan diterima masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Suryawan dan Putra (2020) yang menekankan bahwa keterlibatan akademisi dalam pendidikan dan pendampingan keagamaan berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan komunitas apabila dilakukan secara partisipatif dan berakar pada konteks sosial budaya setempat.

Kolaborasi antara kampus dan komunitas membuka peluang lahirnya kebijakan berbasis bukti di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam mekanisme pelaporan dana umat, pengelolaan kegiatan pasraman, serta pelibatan pemuda dalam pembangunan sosial. Keterlibatan akademisi berpotensi memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan. Namun demikian, integrasi pengetahuan akademik ke dalam kebijakan lokal juga mengandung risiko dominasi wacana formal yang berpotensi menggeser pengetahuan dan kearifan lokal. Dewa Putu Anantara menekankan bahwa kebijakan yang efektif lahir dari dialog setara antara pengalaman komunitas dan pengetahuan akademik. Oleh karena itu, integrasi pendidikan formal, nonformal, dan riset akademik perlu dikelola secara selektif dan reflektif agar berfungsi memperkuat, bukan menggantikan, arsitektur sosial komunitas dalam praktik filantropi berbasis komunitas.

5. Implikasi Sosial: Penguatan Kohesi, Kepercayaan, dan Rasa Kepemilikan

Integrasi nilai-nilai filantropi Hindu berimplikasi langsung pada penguatan kohesi sosial dalam komunitas. Keterlibatan warga dalam rapat banjar, penggalangan dana, kegiatan gotong royong, serta perawatan fasilitas umum meningkatkan intensitas interaksi sosial dan memperluas jejaring komunitas. Partisipasi kolektif tersebut membentuk kohesi sosial yang memperkuat daya tahan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembangunan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Abidin (2016) yang menegaskan bahwa kohesi sosial merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi warga.

Implikasi berikutnya tampak pada penguatan kepercayaan dan rasa kepemilikan kolektif melalui tata kelola dana yang transparan dan partisipatif. Praktik pelaporan terbuka serta pengawasan bersama menumbuhkan kepercayaan antara warga dan pengelola banjar maupun pura, sehingga mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dalam program pembangunan selanjutnya. Hasil wawancara dengan I Gede Yogi Fernando menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana dan pembagian peran dalam kegiatan sosial membuat warga merasa dihargai dan dilibatkan secara setara. Kepercayaan tersebut berjalan beriringan dengan tumbuhnya rasa kepemilikan sosial terhadap infrastruktur yang dibangun melalui kontribusi dana dan kerja bersama, sehingga fasilitas cenderung lebih terawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Temuan empiris ini diperkuat oleh kajian Diansari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi warga dan mekanisme akuntabilitas sosial berkontribusi signifikan terhadap penguatan institusi komunitas. Hal serupa ditegaskan oleh Nurul Fauzi et al.

(2023), yang menempatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan berbasis komunitas. Dengan demikian, integrasi nilai filantropi Hindu tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga membangun modal sosial berupa kohesi, kepercayaan, dan rasa kepemilikan kolektif yang menjadi penopang utama keberlanjutan pembangunan sosial.

6. Implikasi Budaya: Identitas, Daya Hidup Tradisi, dan Ruang Perjumpaan

Infrastruktur sosial berbasis filantropi Hindu berimplikasi langsung pada penguatan identitas budaya dan daya hidup tradisi komunitas. Pura dan balai banjar tidak hanya berfungsi sebagai pusat praktik keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pelestarian budaya, di mana perawatan fasilitas dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kolektif umat. Integrasi nilai filantropi dalam pengelolaan infrastruktur tersebut memperkuat keterikatan warga terhadap tradisi dan identitas Hindu, bahkan dalam konteks masyarakat yang mengalami dinamika percampuran sosial dan budaya. Temuan Mandara et al (2022) menunjukkan bahwa keberlanjutan pemeliharaan fasilitas serta intensitas aktivitas komunitas berperan penting dalam menjaga kontinuitas identitas Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan temuan tersebut, hasil wawancara dengan Ketut Artaye menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam merawat pura dan balai banjar dipahami sebagai bagian dari pengabdian kultural, sehingga tradisi tidak sekadar dipertahankan secara simbolik, tetapi dihidupi dalam praktik keseharian.

Selain memperkuat identitas internal, infrastruktur sosial Hindu juga menciptakan ruang perjumpaan budaya yang bersifat inklusif. Dukungan komunitas terhadap kegiatan seni, upacara adat, dan aktivitas sosial lintas kelompok memperluas makna filantropi dari pelestarian tradisi menuju sarana integrasi sosial. Ketut Artaye menekankan bahwa keterbukaan kegiatan budaya di pura dan balai banjar memungkinkan partisipasi lintas agama dan latar belakang sosial, sehingga nilai dāna dan seva tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi Hindu, tetapi juga memperkuat pluralitas budaya dan kohesi antar komunitas. Hal ini selaras dengan temuan Supardi dan Jauharudin (2025) yang menempatkan ruang budaya berbasis komunitas sebagai medium dialog sosial, serta didukung oleh Raya et al. (2023) yang menegaskan peran praktik budaya bersama dalam membangun relasi lintas identitas.

Meski demikian, fungsi inklusif tersebut menuntut pengelolaan yang peka terhadap perbedaan nilai dan simbol budaya. Ketut Artaye menegaskan bahwa dialog dan kesepakatan bersama menjadi prasyarat agar ruang perjumpaan tidak bergeser menjadi arena dominasi simbolik atau eksklusif kultural. Oleh karena itu, implikasi budaya dari integrasi nilai filantropi Hindu terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara penguatan identitas kultural internal dan keterbukaan sosial dalam masyarakat yang plural.

7. Keberlanjutan dan Tata Kelola: Dari Nilai ke Prosedur

Keberlanjutan pembangunan berbasis filantropi Hindu sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas dalam menerjemahkan nilai dāna, seva, dan karma yoga ke dalam prosedur kelembagaan yang operasional. Praktik musyawarah rutin, pelaporan kas yang terbuka, serta penetapan jadwal pemeliharaan fasilitas menunjukkan bagaimana nilai spiritual diinstitusionalisasikan menjadi mekanisme kerja komunitas. Transformasi nilai ke dalam prosedur tersebut memastikan bahwa filantropi tidak berhenti pada tataran moral, melainkan berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang mengatur aktivitas kolektif secara konsisten dan berulang. Hasil wawancara dengan I Nengah Maharta menegaskan bahwa kejelasan prosedur menjadi kunci agar nilai-nilai tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada figur tertentu.

Penerapan prosedur formal tersebut berimplikasi langsung pada efisiensi tata kelola dan stabilitas sosial komunitas. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menurunkan biaya transaksi sosial, mencegah konflik internal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan lokal. I Nengah Maharta menekankan bahwa pelaporan terbuka dan pengawasan bersama membuat warga merasa aman dan yakin untuk terus berkontribusi dalam setiap siklus pembangunan. Temuan ini sejalan dengan Susanti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas aktor, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan desa. Dalam konteks filantropi Hindu, prosedur kelembagaan berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang menjaga partisipasi warga tetap berkelanjutan.

Selain itu, tata kelola yang melibatkan lintas generasi memperkuat keberlanjutan institusional praktik filantropi. Keterlibatan generasi tua, dewasa, dan muda dalam pengambilan keputusan memungkinkan nilai dan prosedur diwariskan sekaligus disesuaikan dengan perubahan sosial. I Nengah Maharta menegaskan bahwa pelibatan generasi muda sejak tahap perencanaan hingga evaluasi penting untuk menjaga kesinambungan komitmen komunitas. Partisipasi menyeluruh dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terbukti menjadi faktor kunci keberlanjutan program pembangunan berbasis komunitas (Syamsiyah et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan Sumarto (2018) yang menekankan bahwa kepercayaan sosial dan partisipasi warga merupakan fondasi utama keberlanjutan tata kelola pembangunan berbasis komunitas di Indonesia. Dengan demikian, integrasi nilai filantropi Hindu ke dalam struktur kelembagaan tidak hanya menjembatani kesenjangan antara nilai dan praktik, tetapi juga membentuk sistem tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berdaya tahan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi–Keberlanjutan). *Share: Social Work Journal*, 6, 183–196.
- Amarta Dwi Wulandari, Isyandi, B., & Ekowroso, H. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(1), 72–87.
- Arini, N. M. (2024). Moderasi Beragama Dan Inovasi Pembelajaran Di Pasraman Lombok Tengah. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 519–538.
- Ayu Wulandari, N., & Sujatmika. (2024). The Influence of Transparency, Accountability, and Community Participation on the Management of Village Funds (Empirical Study in Villages in Sampung Sub-District, Ponorogo Regency). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 3, 19–30.
- Deru, H., Sobri, K. M., Alfitri, A., & Lionardo, A. (2023). Inclusive Development and Efforts to Improve Community Economy in Indonesia. *Journal of Governance*, 8(1).
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Persepsi Perilaku Prososial Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Peran Moderasi Pengendalian Internal Dan Kepemimpinan. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–24.
- Ganesha, U. P. (2024). Gotong Royong Pada Masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 15(2).

- Irawan, I. K. A., Suda, I. K., & Wirawan, K. I. (2025). Building Dharma-Based Social Infrastructure: The Urgency of Hindu Philanthropy in Alleviating Social Inequality. *Journal of Social Development Studies*, 12(1).
- Latief, H. (2016). Filantropi Dan Pembangunan Sosial: Transformasi Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Praktik Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 123–144.
- Mandara, I. W. K., Gelgel, I. P., & Dharmika, I. B. (2022). Hindu Identity Maintenance of Mixture Marriage in DKI Jakarta. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 222–229.
- Nurhayati, E., Darusman, Y., & Hilman, I. (2021). Integrasi Sosial Masyarakat Multikultural Di Kampung Nusantara. *Geoduction: Journal of Geography Universitas Siliwangi*, 2(1), 1–5.
- Nurul Fauzi, Cicalarici, C., & Rosita, I. (2023). Accountability Mechanism in Village-Owned Financial Institutions: A Case Study on Communal-Based Financial Institutions in West Sumatra. *Jurnal Economics, Business, Accounting & Society Review*, 2(3), 230–240.
- Raya, M. K. F., Siswati, V., Kawakip, A. N., Tohari, A., Setyawan, W. H., & Mukhibat, M. (2023). Menyama Braya: Balinese Hindu–Muslim Ethnoreligious Construction in the Creation of Peace Education. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1).
- Rochani, A., Yuliasuti, N., & Sudarwanto, B. (2021). Philanthropy in Settlement Infrastructure Development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 832(1), 012010.
- Sumarto, H. S. (2018). *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supardi, & Jauharudin. (2025). Crafting Interfaith Harmony Through Ritual and Identity Integration: A Localised Muslim–Hindu Model from Saren, Bali, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 10(1), 65–80.
- Suryawan, I. B., & Putra, I. G. A. P. (2020). Pendidikan Keagamaan Hindu Dan Penguatan Karakter Generasi Muda Dalam Konteks Sosial Budaya Bali. *Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, 7(2), 85–98.
- Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of Community Participation, Multi-Actor Collaboration, Transparency, and Accountability on Village Financial Governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250.
- Syamsiyah, N., Sadeli, A. H., Saidah, Z., Noor, T. I., & Widiyanesti, S. (2025). Community Participation in the Development of Sustainable, Environmentally Conscious Villages in the Cirasea Sub-Watershed, Indonesia. *Sustainability*, 17(11), 1–25.
- Utama, B. (2013). Filantropi Hindu. *Jurnal Pendidikan Agama*, 4(2), 1–10.
- Wulandari, D. R., & Trinugraha, Y. H. (2025). From Collective Solidarity to Rational Participation: Transforming the Royongan Omah Tradition in Ngasinan Village, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 6(1), 29–41.
- Yasini. (2018). Pendidikan Agama Dan Kebudayaan Hindu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 9(2), 44–53.